

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Kegagalan RAT untuk mengatasi kasus impunitas di dalam negaranya sendiri telah mendorong aktor-aktor lain yang bersifat non-negara ikut andil dalam permasalahan tersebut demi terciptanya keadilan bagi warga sipil di RAT, salah satu aktor yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah HRW.

Skripsi ini mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana Strategi Advokasi Human Rights Watch (HRW) dalam Upaya Perlindungan HAM di RAT?”. Melalui konsep analisis Transnational Advocacy Network (TAN) dapat di simpulkan bahwa HRW sebagai aktor non-negara telah mencoba untuk melakukan kontribusinya semaksimal mungkin, yaitu melalui pendekatan-pendekatan advokasi. Adapun berdasarkan konsep TAN pendekatan-pendekatan tersebut adalah; taktik Politik Informasi, taktik pendekatan Politik Simbolik, *Leverage Politics* dan pendekatan birokrasi taktik Kuntabilitas Politik.

Skripsi ini menemukan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh HRW dalam kasus ini sedikit banyak telah membawa perubahan serta *peer pressure* pada khalayak nasional RAT maupun internasional yang masih mencari keadilan bagi kasus impunitas pelanggaran HAM. Namun demikian, upaya tersebut juga masih memiliki kekurangan di dalam implementasinya.

Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah melalui Information politics, di mana HRW berusaha mengembangkan isu HAM, melakukan penyelidikan, dan menyusun laporan tahunan serta berita. HRW juga bekerjasama

dengan media internasional untuk memperluas jangkauan pemberitaan dan menarik perhatian global terhadap isu HAM yang sedang berlangsung.

Sebagai langkah kedua, menggunakan strategi *symbolic politics* sebagai usaha dari sebuah INGO untuk menggunakan simbol-simbol, aksi-aksi, dan narasi dalam situasi tertentu guna menarik perhatian dan memberikan penjelasan agar masyarakat kembali mendukung dan memperhatikan isu tersebut. Melalui tagar #CARcrisis, HRW mengkomunikasikan *symbolic politics* sebagai lambang yang menggambarkan kondisi di RAT.

Ketiga, *leverage politics*, HRW melakukan Strategi *Leverage Politics* yang dilakukan HRW ditargetkan untuk organisasi internasional seperti PBB dan ICC yang memiliki peran terhadap HAM dan individu yang memiliki pengaruh di dunia internasional. Pada tahun 2022, hakim *Special Criminal Court* (SCC) yang dibentuk khusus oleh PBB dan jaringan internasional serta pengadilan lokal RAT akhirnya menyetujui penyelidikan resmi atas pelanggaran HAM. HRW juga melakukan advokasi kepada berbagai negara lain seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Belanda. Upaya advokasi yang dilakukan oleh HRW bertujuan untuk menekan pemerintah RAT terkait kebijakan represif terhadap masyarakat sipil.

Sebagai langkah keempat, dalam *accountability politics*, Meskipun HRW telah menjalankan perannya sebagai NGO pembela HAM, namun upaya-upaya HRW masih terkendala beberapa faktor, seperti sulitnya menghapuskan nilai-nilai otoriter yang telah diterapkan selama puluhan tahun dan kurangnya komitmen berbagai pihak untuk melindungi demokrasi. Meskipun RAT telah berupaya untuk membentuk *Special Criminal Court* untuk mengadili para pelanggar HAM, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat untuk mengimplementasikan nilai-nilai HAM, khususnya hak-hak politik dan demokrasi.

Selama satu dekade HRW melaksanakan perannya dalam menanggulangi pelanggaran HAM di RAT, isu pelanggaran HAM di RAT belum dapat diatasi sepenuhnya karena tingkat keberhasilan HRW sebagai jaringan TANS hanya mencapai pada pengaruh terhadap perubahan “kebijakan” dalam aktor sasaran yakni RAT, dan belum sampai pada tahapan terakhir yaitu pengaruh terhadap “perilaku” negara, sebab saat penelitian ini dilakukan masih terjadi konflik separatisme yang menyebabkan pelanggaran HAM di negara tersebut.

## 5.2 Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan informasi yang ditemukan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh Human Rights Watch dalam upaya perlindungan HAM di RAT. Hal ini disebabkan oleh minimnya penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain terkait peran HRW di negara tersebut. Selain itu, kurangnya informasi mengenai tanggapan pemerintah RAT terhadap isu pelanggaran HAM menyebabkan sumber data yang digunakan terbatas hanya pada karya ilmiah dan berita yang terdapat di internet. Selain itu, isu yang terjadi di RAT masih berlangsung dan belum selesai sehingga penelitian ini belum dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan perlunya penelitian yang lebih mendalam terkait permasalahan tersebut.

